

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan negara Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran tersebut, pemerintah melakukan pembangunan diberbagai bidang, baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Pembangunan secara lebih luas dapat diartikan sebagai usaha untuk lebih meningkatkan produktivitas sumber daya potensial yang dimiliki oleh suatu negara, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, kapital atau modal maupun sumber daya berupa teknologi, dengan tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹

Pembangunan dilaksanakan mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan perekonomian mengatasi berbagai permasalahan pembangunan dan sosial kemasyarakatan seperti pengangguran dan kemiskinan. Selain pertumbuhan ekonomi,

¹ Michael P.Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Ketujuh, jilid 1* (jakarta : Erlangga, 2000), 1.

salah satu aspek penting untuk melihat kinerja pembangunan adalah seberapa efektif penggunaan sumber-sumber daya yang ada sehingga lapangan kerja dapat menyerap angkatan kerja yang tersedia. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat berarti produksi barang/jasa yang dihasilkan meningkat. Dengan demikian diperlukan tenaga kerja semakin banyak untuk memproduksi barang/jasa tersebut sehingga pengangguran berkurang dan kemiskinan menurun.

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran yang ada disuatu daerah menjadi semakin serius. Besarnya tingkat pengangguran merupakan cerminan kurang berhasilnya pembangunan disuatu negara, disamping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka dikategorikan miskin tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai. Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan masalah-masalah lain yang berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Ekonomi makro adalah ilmu yang

mempelajari sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas secara agregat. Pengertian agregat disini mengacu kepada negara. Dengan demikian ekonomi makro berkaitan dengan kinerja ekonomi secara agregat.²

Pengangguran atau tuna karya adalah istilah bagi orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Secara garis besar pengangguran masuk dalam permasalahan kebijakan ekonomi makro dalam jangka panjang. Pengangguran termasuk dalam masalah jangka pendek atau masalah stabilitas. Masalah ini berkaitan dengan bagaimana “menyetir”

²Zaini Ibrahim, *Ekonomi Makro*, (Serang: LP2M IAIN SMH Banten, 2013), 2.

perekonomian nasional dari bulan ke bulan dari triwulan ke triwulan atau dari tahun ke tahun.³

Pada tahun 1990 yang lalu, perhatian masyarakat terhadap masalah kemiskinan kembali diduga setelah cukup lama tidak banyak diperbincangkan di media massa. Perhatian masyarakat tersebut berawal dari pernyataan Bank Dunia tahun 1990 di media massa yang memuji keberhasilan Indonesia dalam mengurangi jumlah penduduk miskin.⁴

Namun, ternyata kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa secara absolut jumlah penduduk Indonesia yang masih hidup dibawah garis kemiskinan masih cukup banyak, yaitu 22,6 juta jiwa pada tahun 1996. Selain itu, masih banyak pula penduduk yang pendapatannya hanya sedikit sekali di atas batas garis kemiskinan. Kelompok “nyaris miskin” ini sangat rawan terhadap perubahan-perubahan keadaan ekonomi, seperti adanya kenaikan harga komoditas-komoditas kebutuhan pokok, atau menurunnya laju pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, masalah kemiskinan ini masih tetap perlu diperhatikan secara serius karena tujuan utama dari

³Ismanto Dwi Yuwono, *Boediono dan (Neoliberalisme)*, 50.

⁴Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi ke-5*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPNYogyakarta,2010), 298.

pembangunan Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.⁵

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan presentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan/Proverty Gap Index (PI): merupakan ukuran rata-rata kesenjangan (defisit) pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin besar defisit.⁶

Dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang pengangguran yang semakin bertambah jumlahnya merupakan masalah yang lebih rumit dan lebih serius dari masalah perubahan dalam distribusi pendapatan yang kurang menguntungkan penduduk yang berpendapatan terendah. Keadaan di negara berkembang dalam beberapa dasawarsa ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi

⁵Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi ke-5*, 298.

⁶Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, *Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Banten*, 2014, 13.

tidak sanggup menciptakan kesempatan kerja yang lebih cepat dari pertambahan penduduk. Oleh karenanya, masalah pengangguran yang dihadapi dari tahun ketahun semakin lama semakin bertambah serius. Lebih lagi, di beberapa negara miskin bukan saja jumlah pengangguran menjadi bertambah besar, tetapi juga proporsi mereka dari keseluruhan tenaga kerja telah menjadi bertambah tinggi.⁷

Upaya menurunkan tingkat pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan adakah sama pentingnya secara teori jika masyarakat tidak menganggur berarti mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dan dengan penghasilan yang dimiliki dari bekerja diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan hidup terpenuhi, maka tidak ada miskin, sehingga dengan tingkat pengangguran rendah maka tingkat kemiskinan juga rendah.

Secara kasar orang memperkirakan bahwa pada masa ini kurang dari kurang lebih 20 sampai 30 persen tenaga kerja yang ada di negara berkembang tidak sepenuhnya digunakan, yaitu menganggur sama sekali ataupun kalau bekerja, jumlah rata-rata waktu kerja setiap hari sangat terbatas. Pada permulaan abad ini

⁷Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, Dan Dasar Kebijakan Edisi Ke-2*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 68.

diperkirakan penduduk dunia mencapai 6.000 juta orang dan 80 persen darinya menetap di negara berkembang berarti kurang lebih 4.800 juta penduduk dunia pada masa ini di negara tersebut. Kalau selanjutnya secara kasar ditaksir pula bahwa sekitar 45 persen darinya merupakan tenaga kerja, maka di negara berkembang ditaksir terdapat 2.160 juta tenaga kerja. Karena ditaksir bahwa di antara 20 sampai 30 persen darinya menganggur atau tidak sepenuhnya digunakan, maka jumlah tenaga kerja yang demikian statusnya meliputi kurang lebih antara 432 juta sampai 648 juta tenaga kerja. Jumlah ini kurang lebih sama besarnya dengan jumlah tenaga kerja yang ada di negara maju pada masa ini.⁸

Tingkat pengangguran di Banten dari tahun 2010-2017 mengalami fluktuatif, dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa angka pengangguran tertinggi terdapat ditahun 2010. Dalam berbagai pandangan pemerintah belum berhasil mengatasi masalah pengangguran terbuka. Lebih dari 519 ribu atau sekitar 5,73% rakyat Banten tidak mempunyai pekerjaan atau pengangguran. Jumlah itu didominasi oleh anak-anak usia 16 sampai 18 tahun. Untuk ukuran nasional, angka tersebut terbilang tinggi. Tingginya angka

⁸Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, Dan Dasar Kebijakan Edisi Ke-2*, 69.

pengangguran tersebut juga dikarenakan banyaknya kaum urban atau wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.⁹

Adapun perkembangan pengangguran dan indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Banten dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah Pengangguran Terbuka dan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Banten 2010-2017.

Tahun	Pengangguran Terbuka (%)	Indeks Kedalaman kemiskinan (%)
2013	9,90	1,02
2014	9,07	0,79
2015	10,03	0,90
2016	8,43	0,76
2017	8,15	0,79

Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.*

Pada tabel 1.1 diatas dilihat bahwa setiap tahunnya pengangguran terbuka mengalami fluktuasi pengangguran terbuka tertinggi terjadi pada tahun 2015 yakni mencapai 10,03%, dan dalam

⁹ Pengangguran Provinsi Banten, http://Banten.Bps.go.id/baken/s.go.id/baken/pdf_publicasi/keadaan-ketenagakerjaan-di-banten-agustus-2013-2015.pdf. (Diunduh Pada 23 November 2017 10:50 WIB).

indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2013 mengalami peningkatan yakni mencapai 1,02% sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan mencapai 0,79%.

Berdasarkan latar belakang masalah-masalah yang dihadapi masyarakat Banten terhadap pengangguran yang berdampak kepada indeks kedalaman kemiskinan penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap “Pengaruh Pengangguran Terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Banten”. Yang mendorong minat dan gagasan serta mengangkatnya menjadi sebuah bahan dan judul skripsi sebagai tugas akhir jenjang S1 yang sedang ditempuh.

B. Pembatasan Masalah

Untuk lebih terperinci dalam penelitian ini, penulis hanya akan membahas tentang bagaimana pengaruh jumlah pengangguran terbuka terhadap indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Banten pada periode 2010-2017.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2010-2017 ?

2. Seberapa besar pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2010-2017 ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2010-2017.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2010-2017.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah :

1. Bagi Penulis

Dapat memperdalam pengetahuan dan ilmu serta wawasan mengenai pengangguran dan indeks kedalaman kemiskinan penulis mengetahui lebih jelas bagaimana pengaruh pengangguran terhadap indeks kedalaman kemiskinan dan seberapa besar pengaruh pengangguran terhadap indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Banten Sebagai sarana untuk

melakukan evaluasi dan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

2. Bagi Pemerintahan Suatu Wilayah

Penulis berharap dari penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan. Sebagai kontribusi positif dalam rangka menyediakan informasi tentang lembaga yang dituju. Dan dapat memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan ekonomi tersebut.

3. Bagi Pihak Lain

Diharapkan dapat dijadikan sebagai studi perbandingan dalam rangka mengkaji ilmu pengetahuan. Dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya yang lebih baik lagi bagi sivitas akademik UIN“Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

F. Kerangka Pemikiran

pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehnya.¹⁰ Pengangguran (*unemployment*) tidak berkaitan dengan mereka yang tidak bekerja, tetapi tidak atau belum

¹⁰ Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), 297.

menemukan pekerjaan.¹¹ Jadi pengangguran merupakan kelompok orang yang ingin bekerja, sedang berusaha mendapatkan atau mengembangkan pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaannya.¹²

Pengangguran merupakan masalah besar di negara berkembang, namun demikian tingkat pengangguran di negara-negara berkembang pada umumnya lebih tinggi. Pengangguran mempunyai dampak negatif tidak hanya pada masalah ekonomi, tetapi juga dapat menjadi pemicu kerawanan sosial. Istilah pengangguran selalu dikaitkan dengan angkatan kerja (*labor force*) dan dalam teori ekonomi makro masalah pengangguran dibahas pada dasar tenaga kerja (*labour market*). Yang juga dihubungkan dengan keseimbangan antara tingkat upah dan tenaga kerja. Pengangguran merupakan orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau yang tidak mempunyai penghasilan, tetapi sedang berusaha mencari pekerjaan.¹³

Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membagi jumlah pengangguran dengan angkatan kerja dikalikan 100%.¹⁴

¹¹Zaini Ibrahim, *Ekonomi Makro*, 107.

¹²Zaini Ibrahim, *Ekonomi Makro*, 108.

¹³Asfia Murni, *Ekonomi Makro*, (Bandung: Refika Aditama, 2019), 191.

¹⁴Prathama rahardja dan Mandala Mandurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro Ekonomi & Makro Ekonomi) edisi ke 3*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), 377.

Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Masalah pengangguran di kota-kota, negara-negara yang sedang berkembang merupakan salah satu gejala yang sangat mencolok dalam perekonomian mereka.¹⁵

Indeks adalah suatu ukuran harga dalam satu periode ke periode lainnya, yaitu indeks harga konsumen dan indeks harga produsen. Indeks harga konsumen merupakan biaya pembelian dari sejumlah barang tertentu, yang mewakili pembelian-pembelian dari para konsumen di kota besar. Indeks harga produsen dan indeks harga konsumen sangat berbeda dalam hal cakupannya. Dalam indeks harga produsen yang dihitung adalah barang-barang setengah jadi atau bahan baku. Indeks harga produsen ini lebih khusus, misalnya indeks yang dari bahan-bahan sensitif yang dipakai sebagai salah satu indikator lingkaran bisnis. Baik indeks konsumen maupun produsen indeks harga yang membandingkan biaya sekarang dan biaya tahun dasar dari sekumpulan barang dengan susunan yang tetap.¹⁶

¹⁵Michael p Todaro, *Ekonomi Untuk Negara Berkembang Edisi Ke Tiga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 297.

¹⁶Suryana, *ekonomi pembangunan problematika dan pendekatan*, (jakarta : salemba empat, 2000), 12.

Sampai sekarang ini kita telah menyajikan sebuah gambaran yang luas mengenai distribusi pendapatan dan masalah kemiskinan dengan menunjukkan bagaimana luasnya ruang lingkup kemiskinan absolut telah disebabkan oleh kombinasi antara masalah pendapatan perkapita yang rendah dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Akan tetapi sebagaimana kita telah mengetahui semakin tinggi tingkat pendapatan perkapita bukan merupakan suatu jaminan bahwa tingkat kemiskinan itu akan menjadi semakin rendah. Oleh karena itu, pemahaman mengenai sifat distribusi pendapatan berdasarkan ukuran atau besarnya pendapatan perorang, adalah pusat dari setiap kegiatan menganalisis permasalahan kemiskinan di sejumlah negara yang pendapatannya rendah.¹⁷

Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu situasi atau kondisi yang dialami oleh seseorang atau kelompok orang, yang tidak mampu menyelenggarakan sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Masalah yang kompleks ini dipengaruhi berbagai faktor yang berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran,

¹⁷Michael P. Todaro, *Ekonomi Untuk Negara-Negara Berkembang Edisi Ketiga*, (Jakarta:Bumi Aksara,1994), 220.

kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, dan lingkungan. Ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan terjadi dikarenakan kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan. Dalam teori nurkse mengemukakan teorinya tentang lingkaran perangkap kemiskinan pada hakekatnya nurkse berpendapat bahwa kemiskinan bukan saja disebabkan oleh ketiadaan pembangunan pada masalah tetapi juga menghadirkan hambatan kepada pembangunan dimasa yang akan datang.¹⁸

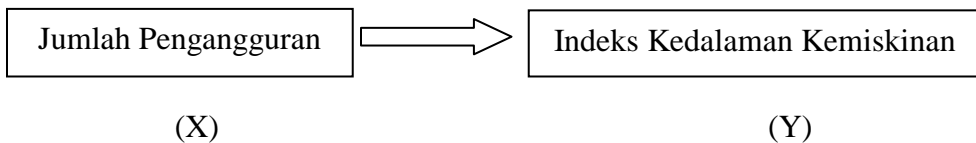
Untuk mengukur tingkat kemiskinan, diperlukan suatu konsep kemiskinan yang jelas. Bank Dunia menyatakan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mendapatkan standar kebutuhan minimum. Konsep yang dipakai Badan Pusat Statistik (BPS) adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Angka kemiskinan

¹⁸Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, Dan Dasar Kebijakan Edisi Ke-2*, 113.

dihitung dengan menggunakan metode garis kemiskinan (GK). Komponen dari GK adalah garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM).¹⁹

Dapat disimpulkan bahwa pengaruh jumlah pengangguran terhadap indeks kedalaman kemiskinan sebagai berikut :

Gambar 1.1



G. Sistematika Pembahasan

Untuk penyusunan penelitian ini, pembahasan dibagi menjadi lima bab yang memuat ide-ide pokok yang kemudian dibagi lagi menjadi sub bab, sehingga secara keseluruhan menjadi satu kesatuan yang saling menjelaskan satu pemikiran. Sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah dalam penulisan skripsi, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan dan

¹⁹Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, *laporan eksekutif perkembangan tingkat kemiskinan provinsi banten september 2013*, (serang: badan pusat statistik provinsi banten), 2.

manfaat penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, hipotesis, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teori, berisikan pembahasan mengenai teori-teori mengenai pengangguran, faktor-faktor penyebab terjadinya pengangguran, cara mengatasi pengangguran, dan pandangan islam mengenai pengangguran. pengertian indeks kedalaman kemiskinan, ciri-ciri kemiskinan, indikator kemiskinan, dan pandangan islam mengenai kemiskinan.

BAB III Metodologi Penelitian, berisikan pembahasan mengenai ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan operasional variabel penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, berisikan mengenai pembahasan gambaran umum objek penelitian, dan analisis hasil penelitian.

BAB V Kesimpulan dan Saran, berisikan mengenai uraian kesimpulan dari hasil yang telah dilakukan dan memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh solusi untuk permasalahan tersebut.